

Judul : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEPEMIMPINAN
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO - JUSUF KALLA
MENGENAI PENANGANAN MASALAH KEMISKINAN
(Studi Kasus di Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten)

Nama : Randi Primadia

NIM : D2B 004 124

ABSTRAKSI

Kepemimpinan nasional di Indonesia yang telah berganti-ganti sebanyak lima kali, ternyata cukup berpengaruh terhadap kehidupan rakyat Indonesia, sehingga menimbulkan persepsi dan partisipasi yang berbeda pula pada setiap masa kepemimpinannya, terutama pada era kepemimpinan saat ini (Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla) dimana banyak terobosan-terobosan baru dalam berbagai kebijakan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dalam bidang penanganan masalah kemiskinan. Namun, keadaan ekonomi yang semakin sulit, menjadikan tingkat keyakinan masyarakat terhadap sang pemimpin berkurang dan bahkan dapat berubah menjadi krisis kepercayaan.

Melihat fenomena yang terjadi, maka penulis ingin mengetahui sejauh mana tingkat penilaian dan persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla terhadap penanganan masalah kemiskinan yang dirasa belum menunjukkan hasil-hasil yang cukup signifikan, serta tingkat efektivitas dari program-program pengentasan kemiskinan perlu dikaji ulang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Untuk penarikan sampel, penulis menggunakan metode *simple random sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 96 orang. Daerah penelitian meliputi seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Serang, sehingga tiap kelurahan akan diambil 2-16 orang responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu merupakan hasil kuesioner terhadap responden, dan juga sumber data sekunder yang didapatkan dari buku, laporan, dokumen, serta data lain yang dipublikasikan melalui surat kabar, majalah, dan situs di internet.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat di Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten terhadap kepemimpinan nasional saat ini mengenai penanganan masalah kemiskinan melalui program-program pengentasan kemiskinan yang telah digulirkan, ternyata masih banyak masyarakat yang menilai bahwa program-program tersebut kurang efektif karena tingkat kemiskinan masih sangat tinggi dan kesejahteraan yang diidam-idamkan selama ini masih belum tercapai. Hal tersebut dapat menjadi “bumerang” kepada pemimpin tersebut, apabila tidak segera diambil sikap evaluatif yang baik.

Kata Kunci : Persepsi, Kepemimpinan Nasional, Penanganan Kemiskinan.

Pembimbing I

Disetujui oleh

Tanggal, Juni 2008

(Drs. Purwoko, M.S)

NIP. 131 124 441

Title : SOCIETY'S PERCEPTION REGARDING SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO – JUSUF KALLA'S LEADERSHIP IN TERMS
OF SOLVING SOCIETY POVERTY ISSUE

(Case Study in Subdistrict of Serang, Serang City, Banten Province)

Name : D2B004124_RANDI PRIMADIA

NIM : D2B004124

ABSTRACT

The Changing of Indonesia National Leadership until five times has been influenced enough the way of life of Indonesian People. It's also make different perception and different participation of people on each governmental era, especially on this present times (on SBY-JK era) when there are so many programs for preventing the poverty. However, the public trustworthy to the government can be decreased or even can be made into the crisis of trust by the economical problem.

Because of this phenomena, the writer is interested to know how far the valuation and perception of Indonesian people with the Indonesia National Leadership now, which we know that the preventing poverty program hasn't show the significance result yet and also to observe and rearranged the effectively of all the preventing poverty programs.

The method of this research is using the descriptive approach. For the sample, the writer is using simple random sampling method with 96 people as the sample. The research area is taken on whole district in Serang and each district has 2-16 people as respondent. The data source, which is using on this research, is primary data. The primary data is the questioners result from all respondents. The writer is also using the secondary data, which is mean the data has taken from books, reports, documents, and from other data which is published by newspapers, magazines, and from internet.

The result of this research is showing us that the citizen in Serang province valuating that the preventing poverty program is not effective because of the rate of poverty is still high and the wealthness is not fulfill yet. This can be like a 'boomerang' for the leader, on this focus is president, if he won't take a good evaluative attitude soon.

Key Words : Perception, National of Leadership, Preventing the Poverty.

Approved by first of Counselor

Date, June 2008

(Drs. Purwoko, M.S)

NIP. 131 124 441

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai kepemimpinan nasional di Indonesia, tentulah bukan hal yang asing lagi, terlebih Republik Indonesia merupakan suatu negara besar dengan sejarah kepemimpinan nasional yang khas pada masanya. Mulai dari masa kepemimpinan Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan yang terakhir kini tengah memimpin Susilo Bambang Yudhoyono, kesemuanya itu memiliki karakter yang berbeda-beda pula, terutama dalam menentukan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut seluruh rakyat Indonesia demi memperjuangkan kehidupan masyarakat Indonesia.

Namun, rakyat yang bagaimana, yang mereka perjuangkan? Jika mau jujur, penulis melihat bahwa setiap terjadinya pergantian pemimpin (Presiden) di negeri ini, terutama pasca Orde Baru justru yang terkena dampak langsung dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin tersebut adalah rakyat kecil dan masyarakat yang belum mapan berdasarkan tingkat sosial ekonominya, ini dikarenakan para pemimpin hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan permasalahan yang rakyat sedang alami, sedangkan kelompok menengah ke atas tidak akan terlalu merasakan langsung dampak tersebut. Sebagai contoh; tarif dasar listrik (TDL) dan telepon membumbung tinggi, harga beras mahal dan sulit didapat, kelangkaan bahan bakar, bencana banjir, dan sebagainya. Kesemuanya tersebut dianggap biasa oleh para pemimpin di republik ini. Tetapi justru para pemimpin tersebut terlalu asyik dengan egonya masing-masing, seperti menggusur ketua

partainya atau mendirikan partai baru dengan program yang *seabrek*. Bukankah hal tersebut dapat dikatakan bahwa ada ketidakseimbangan antara pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya.

Masalah utama dalam negara yang sedang berkembang seperti Republik Indonesia ini adalah tingkat kemiskinan. Disadari atau tidak, jumlah angka kemiskinan di Indonesia sejak bergulirnya reformasi hingga saat ini, belum juga mengalami penurunan yang sangat berarti, seringnya terjadi fluktuatif di setiap tahunnya, mengakibatkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemimpin menjadi goyah, bahkan seringnya demonstrasi menuntut turun dari jabatan tertinggi tersebut.

Disadari bahwa upaya mengentaskan kemiskinan secara jangka panjang tidak mudah dan membutuhkan berbagai pendekatan serta strategi yang terpadu karena persoalan kemiskinan bersifat multi dimensi. Pemerintah selalu berupaya menyusun strategi penanggulangan kemiskinan agar berbagai program pengentasan kemiskinan di berbagai bidang kehidupan dapat dilaksanakan secara efektif. Pada saat yang sama, pemerintah sedang berupaya mewujudkan pengurangan angka penduduk miskin dengan cara membantu meringankan beban kehidupan mereka secara langsung.

Pemerintah Indonesia selama ini selalu memberikan perhatian yang besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dapat kita lihat pada masa kepemimpinan nasional saat ini, dimana program-program baru dalam upaya penanganan kemiskinan terus digulirkan demi tercapainya target penurunan tingkat kemiskinan setiap tahunnya, misalnya melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Proyek

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Program Raskin (operasi beras untuk rakyat miskin), Askeskin (asuransi kesehatan untuk rakyat miskin), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program-program tersebut cukup populer di tengah-tengah masyarakat berbagai kalangan sebagai langkah strategis pemerintah dalam upaya pengentasan masalah kemiskinan. Namun, masih belum menurunnya tingkat kemiskinan di Indonesia, menjadikan sebuah pertanyaan besar dalam diri penulis maupun berbagai kalangan lain, apakah program-program penanganan kemiskinan tersebut sudah efektif dalam menekan jumlah angka kemiskinan yang dirasa semakin meningkat saja. Selain itu, persepsi masyarakat menjadi hal penting dalam menilai tingkat efektivitas program-program tersebut.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat di Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten terhadap kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla dalam hal kebijakan penanganan masalah kemiskinan?
2. Bagaimana dengan tingkat efektivitas kebijakan tersebut, apakah sudah tepat sasaran atau terdapat kesenjangan antara implementasi dan janji-janji Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla pada waktu kampanye dulu.

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menemukan jawaban tentang persepsi masyarakat di Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten terhadap kinerja

pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla dalam hal kebijakan penanganan masalah kemiskinan.

- b. Untuk mengetahui tingkat efektivitas kebijakan tersebut, sehingga pada kesimpulannya akan terlihat hasil yang diperoleh.

D. Kerangka Teori

1. Persepsi, merupakan suatu proses perjalanan sejak dikenalnya suatu objek melalui organ-organ indera sampai diperolehnya gambaran yang jelas dan dapat dimengerti serta diterimanya objek tersebut dalam kesadaran kita. Persepsi sendiri mencakup dua proses kerja yang saling berkaitan, pertama, menerima kesan melalui penglihatan, sentuhan dan inderawi, kedua, penafsiran penetapan arti kesan-kesan inderawi tadi. Tiga syarat yang harus dipenuhi agar individu dapat menyadari persepsi dan mengadakan persepsi, yaitu adanya objek yang dipersepsikan, alat indera/reseptor, serta perhatian.
2. Masyarakat sebagai komponen interaksi, yaitu interaksi antara pemerintah dan masyarakat, diantara lembaga-lembaga pemerintah, serta diantara kelompok dan individu dalam masyarakat, dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan pada dasarnya merupakan perilaku politik. Masyarakat berhak mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan, karena keputusan pemerintah sangat mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.
3. Kepemimpinan nasional, bahwa kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan lebih merupakan hasil dari proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang. Kepemimpinan bukanlah

jabatan atau gelar, melainkan sebuah kelahiran dari proses panjang perubahan dalam diri seseorang. Ketika seseorang menemukan visi dan misi hidupnya, ketika terjadi kedamaian dalam diri (*inner peace*) dan membentuk bangunan karakter yang kokoh, ketika setiap ucapan dan tindakannya mulai memberikan pengaruh kepada lingkungannya, dan ketika keberadaannya mendorong perubahan dalam organisasinya, pada saat itulah seseorang lahir menjadi pemimpin sejati. Jadi, pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang.

4. Kemiskinan, ialah kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan pangan, sandang, papan, hidup sehat, pendidikan, komunikasi sosial dan sebagainya. Penduduk miskin tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhannya, tidak saja karena tidak memiliki asset sebagai sumber pendapatan, melainkan juga karena struktur sosial ekonomi, sosial budaya dan sosial politik tidak membuka peluang bagi orang miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan”.

H. Metodologi Penelitian

H.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Adapun yang dimaksud dengan tipe penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian deskriptif ini juga bertujuan untuk mencari informasi faktual yang mendetail serta mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk

mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung¹.

Sesuai dengan asal kata deskriptif berasal dari bahasa latin yakni *descriptives* yang berarti uraian, maka penelitian ini berusaha menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan, objek yang akan diteliti. Karena yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah masyarakat, maka akan diuraikan, dijelaskan, serta digambarkan mengenai persepsi masyarakat di Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten terhadap kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla mengenai penanganan masalah kemiskinan.

H.2. Populasi dan Sampel Penelitian

a) Populasi Penelitian

Populasi penelitian adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya dapat diduga dan paling sedikit mempunyai sifat yang kurang lebih sama. Populasi penelitian ini adalah masyarakat di wilayah Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten yang berjumlah sebanyak 194.165 jiwa.

b) Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan sampel bertujuan (*purposive sample*). Dalam *purposive sample*, dipertimbangkan sesuai dengan tujuan penelitian. Dasar pertimbangan pemilihan sampel ditentukan sendiri oleh penyusun dimana terdapat

¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, CV.Rajawali, Jakarta, 1988. Hal 25

persyaratan yang dibuat sebagai literatur yang harus dipenuhi sebagai sampel.

Melihat besarnya populasi (yang kemudian akan dijadikan responden) disamping kelemahan peneliti yang tidak sanggup untuk menjangkau populasi secara keseluruhan, maka sampel penelitian dalam penelitian ini masih meliputi seluruh kelurahan, hanya saja tiap-tiap kelurahan akan diambil para responden yang jumlahnya antara 2-16 orang responden per kelurahan yang dilakukan secara *random*, yaitu pengamatan didistribusikan secara bebas untuk mengurangi atau menghilangkan bias. Karena jenis *random* yang digunakan yaitu *simple random sampling*, maka dalam penelitian ini besarnya sampel diambil berdasarkan perhitungan dengan rumus Frank Lynch sebagai berikut :

$$n = \frac{NZ^2 \cdot p(1-p)}{Nd^2 + Z^2 \cdot p(1-p)}$$

Ket :

n = Jumlah sample.

N = Jumlah populasi.

Z = Nilai variabel normal pada penelitian ini, yaitu 1,96 untuk kepercayaan 95 %.

p = Harga patokan tertinggi yang ditentukan dalam penelitian ini, yaitu 0,5.

d = Sampling error dalam penelitian ini yaitu 0,10.

$$\begin{aligned} n &= \frac{194.165 (1,96)^2 \times 0,5 \times (1-0,5)}{194.165 (0,1)^2 + (1,96)^2 \times 0,5 \times 0,5} \\ &= \frac{194.165 \times 3,84 \times 0,5 \times 0,5}{194.165 (0,01) + (3,84)(0,5)(0,5)} \\ &= \frac{173.085,24}{1941,65+0,96} \\ &= \frac{186.398,4}{1942,61} \\ &= 95,952559 \end{aligned}$$

n = 96 orang responden

H.3. Sumber Data

- a) Data primer, adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya (pihak pertama), yaitu responden penelitian mengenai persepsi masyarakat di Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten terhadap kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla mengenai penanganan masalah kemiskinan dengan menggunakan daftar pertanyaan (*questioner*) yang ditujukan kepada masyarakat yang diambil sebagai sampel.
- b) Data sekunder, adalah data-data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, meliputi kajian pustaka/ buku-buku, laporan-laporan, literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian mengenai persepsi masyarakat di Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten terhadap kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla mengenai penanganan masalah kemiskinan.

H.4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan sebagai non-partisipan.
- Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kondisi yang dirasakan para responden dalam hal ini para masyarakat dalam menyikapi kepemimpinan nasional saat ini (Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla) mengenai penanganan masalah kemiskinan.

- Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang relevan seperti tulisan-tulisan, artikel-artikel dari buku, jurnal, media cetak dan media internet.

H.5. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan :

- *Editing*, yaitu kegiatan mengoreksi atau meneliti kembali keseluruhan data yang diperoleh dari daftar pertanyaan untuk mengetahui lengkap tidaknya suatu pengisian, keterbacaan tulisan, dan revisi jawaban.
- *Coding*, yaitu kegiatan mengklasifikasikan jawaban dari responden menurut macam atau jenisnya dengan tanda atau kode-kode tertentu untuk memudahkan tabulasi.
- *Tabulating*, yaitu kegiatan pembuatan tabel-tabel dengan maksud untuk mempermudah dalam membaca dan memahami data. Pada tahap ini dikatakan bahwa pengolahan data telah selesai.

H.6. Analisis Data

Dari semua data yang diperoleh, hasil penelitian ini kemudian dianalisis, sehingga diharapkan data-data tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini serta memberikan rekomendasi bagi penyelesaiannya.

Data yang disusun dalam tabel-tabel kemudian diuraikan berdasarkan gejala dari objek yang diteliti, keseluruhan data dari variabel X dan Y akan di telaah kembali untuk diambil kesimpulan sebagai jawaban dari penelitian tersebut.

Secara garis besar ada dua bentuk analisa data, yaitu analisa kuantitatif dan analisa kualitatif. Analisa kuantitatif adalah analisa yang diperuntukkan bagi data-data yang masih berwujud angka-angka. Sedangkan analisa kualitatif adalah analisa yang digunakan untuk data yang bersifat kualitatif (tidak berwujud angka-angka). Data kuantitatif diperoleh dari kuesioner, observasi dan dokumentasi.

Kedua analisa tersebut tidak dapat dipisahkan karena tidak semua data bersifat kualitatif ataupun sebaliknya. Dari analisa tersebut akan diperoleh jawaban atas hipotesa maupun permasalahan-permasalahan yang ada. Selain itu juga dari analisa tersebut juga diharapkan akan diperoleh rekomendasi untuk menyelesaikan semua masalah yang terkait.

Langkah-langkah penelitiannya adalah sebagai berikut :

- i. Menelaah keseluruhan data yang ada, dimulai dengan data yang telah tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari berbagai buku-buku dan literatur yang menunjang.
- ii. Seleksi data, yaitu kegiatan untuk merangkum, menyusun secara sistematis dan memilih hal-hal pokok dari data atau laporan.
- iii. Penafsiran data, yaitu kegiatan penafsiran data/ laporan yang diperoleh agar dapat melihat gambaran-gambaran keseluruhan atau bagian-bagain tertentu dari penelitian, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.
- iv. Pengambilan kesimpulan, dari data yang diperoleh kemudian dipahami, dinalisis, dan diambil kesimpulan dengan menggunakan prosedur analisis seperti yang telah dijelaskan diatas sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat di Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten terhadap kepemimpinan nasional saat ini mengenai penanganan masalah kemiskinan melalui program-program pengentasan kemiskinan yang telah digulirkan, ternyata masih banyak masyarakat yang menilai bahwa program-program tersebut kurang efektif karena tingkat kemiskinan masih sangat tinggi dan kesejahteraan yang di idam-idamkan selama ini masih belum tercapai, hal tersebut dapat dilihat pada jawaban-jawaban dari para responden berikut ini :

1. Persepsi Kognitif Masyarakat Terhadap Performance Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla (SBY-JK).

Dari responden yang diteliti, tiap-tiap responden memiliki penilaiannya masing-masing mengenai pengenalan/ pengetahuan mereka terhadap pemimpin nasionalnya yang secara umum akan bermuara pada *performance* sang pemimpin tersebut. Secara lengkapnya dapat disimak pada penyajian tabel berikut ini :

Kategorisasi variabel Persepsi Kognitif Masyarakat Terhadap Performance Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla (SBY-JK)

No	Kategori	Frekuensi (Jiwa)	Persentase (%)
1	Rendah	8	8,3
2	Kurang Tinggi	31	32,3
3	Tinggi	34	35,4
4	Sangat Tinggi	23	24,0
	Jumlah	96	100,0

Sumber : Data primer yang diolah

2. Persepsi Affektif Masyarakat Terhadap Kebijakan Umum Pemerintah

Peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan maupun setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah merupakan bukti dari gambaran dukungan rakyat secara riil kepada pemimpinnya, sehingga tujuan dari setiap kebijakan tersebut yang pada akhirnya akan bermuara demi peningkatan kesejahteraan rakyat akan dapat cepat terwujud apabila sinergi pemimpin dan yang dipimpin berlangsung secara kondusif. Persepsi affektif responden penelitian secara lengkap akan disajikan dalam tabel berikut ini :

Kategorisasi variabel Persepsi Affektif Masyarakat Terhadap Kebijakan Umum Pemerintah

No	Kategori	Frekuensi (Jiwa)	Persentase (%)
1	Rendah	15	15,6
2	Kurang Tinggi	42	43,8
3	Tinggi	32	33,3
4	Sangat Tinggi	7	7,3
	Jumlah	96	100,0

Sumber : Data primer yang diolah

3. Persepsi Evaluatif Masyarakat Terhadap Kepemimpinan dan Kebijakan Umum Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla.

Penilaian akhir masyarakat terhadap kepemimpinan melalui kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah selama mereka menjabat sebagai pemimpin suatu bangsa dan negara tidak serta merta menimbulkan kesan baik dan positif sehingga pada periode yang akan datang dapat terpilih lagi sebagai orang nomor satu di Indonesia. Secara lengkapnya dapat disimak pada penyajian tabel berikut ini :

Kategorisasi variabel Persepsi Evaluatif Masyarakat Terhadap Kepemimpinan dan Kebijakan Umum Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla (SBY-JK)

No	Kategori	Frekuensi (Jiwa)	Persentase (%)
1	Rendah	7	7,3
2	Kurang Tinggi	48	50,0
3	Tinggi	28	29,2
4	Sangat Tinggi	13	13,5
	Jumlah	96	100,0

Sumber : Data primer yang diolah

4. Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan-kebijakan Penanganan Masalah Kemiskinan di Indonesia.

4.1. Program BLT (Bantuan Langsung Tunai).

Merupakan kompensasi BBM karena kebijakan pengurangan subsidi BBM yang selama ini banyak dinikmati oleh golongan menengah keatas menjadi faktor pendorong bagi pemerintah untuk mengurangi subsidi tersebut. Hal tersebut berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang sangat memberatkan bagi penduduk miskin. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dan hampir miskin sebesar 100.000 rupiah per bulan yang diterima setiap tiga bulan sekali. Untuk dapat melihat penilaian masyarakat di Kecamatan Serang terhadap program BLT, maka dapat dilihat pada penyajian tabel berikut ini :

Kategorisasi variabel Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan-kebijakan Penanganan Masalah Kemiskinan di Indonesia melalui Program BLT (Bantuan Langsung Tunai)

No	Kategori	Frekuensi (Jiwa)	Persentase (%)
1	Rendah	8	8,3
2	Kurang Tinggi	51	53,1
3	Tinggi	32	33,3
4	Sangat Tinggi	5	5,2
	Jumlah	96	100,0

Sumber : Data primer yang diolah

4.2. Program P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan).

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan

kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. Proyek P2KP menekankan pada pendekatan komunitas dan bertumpu pada pengembangan manusia. Untuk dapat melihat penilaian masyarakat di Kecamatan Serang terhadap program P2KP, maka dapat dilihat pada penyajian tabel berikut ini :

**Kategorisasi variabel Persepsi Masyarakat
Terhadap Kebijakan-kebijakan
Penanganan Masalah Kemiskinan
di Indonesia melalui Program P2KP
(Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan)**

No	Kategori	Frekuensi (Jiwa)	Persentase (%)
1	Rendah	18	18,8
2	Kurang Tinggi	45	46,9
3	Tinggi	26	27,1
4	Sangat Tinggi	7	7,3
	Jumlah	96	100,0

Sumber : Data primer yang diolah

4.3. Program Raskin (Penyediaan Beras Untuk Rakyat Miskin).

Semakin mahalnya harga beras yang merupakan makanan pokok penduduk sebagian besar Indonesia, menjadi perhatian utama bagi pemerintah untuk mengupayakan kepada masyarakat miskin agar tetap dapat menikmati nasi dengan harga murah dan terjangkau. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan suatu program untuk kalangan ekonomi yang sangat lemah, dengan kompensasi harga beras yang harganya jauh lebih murah dari harga pasaran dengan tujuan supaya rakyat miskin juga dapat menikmati beras sebagai bahan makanan pokok rakyat Indonesia dengan harga yang terjangkau tentunya. Untuk melihat penilaian masyarakat terhadap program Raskin, maka dapat dilihat pada tabel berikut :

**Kategorisasi variabel Persepsi Masyarakat
Terhadap Kebijakan-kebijakan Penanganan Masalah Kemiskinan
di Indonesia melalui Program Raskin
(Penyediaan Beras Untuk Rakyat Miskin)**

No	Kategori	Frekuensi (Jiwa)	Persentase (%)
1	Rendah	8	8,3
2	Kurang Tinggi	39	40,7
3	Tinggi	36	37,5
4	Sangat Tinggi	13	13,5
	Jumlah	96	100,0

Sumber : Data primer yang diolah

4.4 Program Askeskin (Asuransi Kesehatan Untuk Rakyat Miskin).

Program Askeskin merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla, yang diharapkan dengan adanya program tersebut, penduduk miskin bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan gratis sehingga uang yang ada pada mereka dapat digunakan untuk kebutuhan lain-lainnya disamping terjaminnya kesehatan mereka beserta keluarganya. Untuk melihat penilaian masyarakat terhadap program Askeskin, maka dapat dilihat pada tabel berikut :

**Kategorisasi variabel Persepsi Masyarakat
Terhadap Kebijakan-kebijakan Penanganan Masalah Kemiskinan
di Indonesia melalui Program Askeskin
(Asuransi Kesehatan Untuk Rakyat Miskin)**

No	Kategori	Frekuensi (Jiwa)	Persentase (%)
1	Rendah	5	5,2
2	Kurang Tinggi	51	53,1
3	Tinggi	30	31,3
4	Sangat Tinggi	10	10,4
	Jumlah	96	100,0

Sumber : Data primer yang diolah

4.5. Program BOS (Bantuan Oerasional Sekolah)

Dengan semakin tingginya biaya sekolah demi mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, pemerintah berupaya memberikan bantuan kepada tiap-

tiap sekolah untuk menyediakan berbagai barang-barang operasional gratis kepada setiap siswa, sehingga para siswa tidak lagi memikirkan biaya untuk kebutuhan belajarnya, mengingat harga-harga penunjang proses belajar pada saat ini tidak murah lagi. Demi pengembangan pendidikan secara nasional, pemerintah memberikan bantuan anggaran melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak tahun 2005 di setiap propinsi. Untuk melihat penilaian masyarakat terhadap program BOS, maka dapat dilihat pada tabel berikut :

**Kategorisasi variabel Persepsi Masyarakat
Terhadap Kebijakan-kebijakan Penanganan Masalah Kemiskinan
di Indonesia melalui Program BOS
(Bantuan Operasional Sekolah)**

No	Kategori	Frekuensi (Jiwa)	Persentase (%)
1	Rendah	2	2,1
2	Kurang Tinggi	24	25,0
3	Tinggi	53	55,2
4	Sangat Tinggi	17	17,7
	Jumlah	96	100,0

Sumber : Data primer yang diolah

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang telah didapatkan oleh penulis, dan juga berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penanganan masalah kemiskinan di Indonesia, bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan seperti membalik telapak tangan. Namun butuh kerja sama yang baik dari berbagai pihak untuk mensukseskan program-program pengentasan masalah kemiskinan dengan konsep yang jelas, sehingga pada akhirnya dapat menjadi suatu alat yang efektif dalam menekan angka kemiskinan penduduk. Program-program utama pemerintah dalam pengentasan masalah kemiskinan diantaranya ialah program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Operasi Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Asuransi Kesehatan untuk Rakyat Miskin (Askeskin), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bukti kesungguhan pemerintah tersebut tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pencanangan program-program utama penanganan masalah kemiskinan saja, akan tetapi juga dibuktikan dengan kucuran atau alokasi dana untuk pengentasan masalah kemiskinan yang terus meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun, misalnya pada tahun 2004 (awal Susilo Bambang Yudhoyono memimpin), alokasi APBN untuk program pengentasan kemiskinan berjumlah 18 triliun rupiah. Sementara pada tahun 2006, anggaran pengentasan kemiskinan meningkat lagi menjadi 42 triliun rupiah. Pada tahun 2007, alokasi dana tersebut semakin meningkat

menjadi 51 triliun rupiah. Sehingga diharapkan dengan semakin meningkatnya alokasi anggaran tersebut dari tahun ke tahun, akan berdampak kepada sisi lain yang lebih menguntungkan rakyat kecil, yang pada tujuannya jumlah penduduk miskin akan semakin berkurang dari tahun ke tahunnya.

2. Dari data yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa ternyata persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla mengenai penanganan masalah kemiskinan pada masyarakat di Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten, melalui program-program pengentasan kemiskinan, dinilai masih belum berhasil untuk dapat mengangkat rakyat kecil dari jurang kemiskinan, sehingga kesejahteraan yang diidam-idamkan masyarakat menjadi sulit untuk terwujud, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tingkat Perbandingan Persepsi Masyarakat
Terhadap Kebijakan-Kebijakan Pemerintah
Dalam Penanganan Masalah Kemiskinan di Indonesia**

Program	Penilaian Hasil Pelaksanaan (dalam persentase)			
	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
BLT	5,2 %	33,3 %	53,1 %	8,3 %
P2KP	7,3 %	27,1 %	46,9 %	18,8 %
Raskin	13,5 %	37,5 %	40,7 %	8,3 %
Askeskin	10,4 %	31,3 %	53,1 %	5,2 %
BOS	17,7 %	55,2 %	25,0 %	2,1 %

Sumber : Data primer yang diolah

3. Hasil yang didapatkan oleh penulis, mendapatkan bahwa tingkat efektivitas dari program-program penanganan kemiskinan masih kurang maksimal, hal ini dapat dilihat pada tabel kemiskinan Indonesia dimana pada tahun pertama jumlah angka kemiskinan mengalami penurunan sekitar 1 juta

jiwa, namun pada tahun ke-2 mengalami kenaikan pesat sekitar 3,95 juta jiwa, walaupun pada tahun ke-3 angka tersebut dapat ditekan kembali sekitar 1,88 juta jiwa, dan pada tahun ke-4 ini diprediksikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat akan kembali naik sekitar 10-15 % akibat adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 33 %. Hal tersebut juga didukung oleh persepsi masyarakat sebagai responden yang menilai bahwa program-program pengentasan kemiskinan tersebut masih kurang efektif, misalnya pada program BLT, masyarakat menilai kurang dengan persentasi 48,9 %, program P2KP dengan persentasi 44,8 %, program Raskin dengan persentasi 33,3 %, program Askeskin dengan persentasi 42,7 %, dan program BOS dengan persentasi 39,6 %.

B. SARAN

Setelah mengetahui kesimpulan dari penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla mengenai penanganan masalah kemiskinan pada masyarakat di Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten, maka saran yang dapat diberikan penulis :

1. Permasalahan kemiskinan memang tidak ada habisnya, namun pemerintah harus terus berupaya mencari solusi terbaik untuk dapat menekan jumlah angka tingkat kemiskinan yang tersebar di berbagai wilayah. Saran penulis, dalam pelaksanaannya dilapangan, setiap program pengentasan kemiskinan hendaknya jangan terlalu banyak pihak yang turut campur, sehingga jumlah alokasi dana yang dikucurkan kepada rakyat miskin, akan diterima dengan jumlah yang sedikit karena melewati “banyak pintu”.

Selain itu, jumlah kucuran dana untuk penanganan masalah kemiskinan harus diperbesar lagi, hal ini dikarenakan semakin meningkatnya berbagai harga kebutuhan bahan pokok masyarakat.

2. Persepsi masyarakat merupakan refleksi terhadap hal-hal yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dalam kehidupan mereka sehari-hari, saat ini persepsi masyarakat belumlah menilai baik terhadap *performance*, kebijakan umum, dan penilaian-penilaian kebijakan penanganan masalah kemiskinan melalui program-program pengentasan kemiskinan, penilaian masyarakat baru sebatas cukup atau bahkan kurang. Sehingga saran penulis disini ialah bahwa pemerintah harus lebih meningkatkan kualitas dalam setiap kebijakan dan kinerja aparatur pemerintah, dalam hal ini adalah kebijakan-kebijakan penanganan masalah kemiskinan dengan selalu berprinsip kepada kepentingan kesejahteraan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang jelas-jelas butuh perhatian lebih baik moril terlebih lagi materiil dari pihak pemerintah.
3. Perwujudan dari hasil program pengentasan kemiskinan pada hakikatnya ialah melepaskan rakyat miskin dari belenggu kemiskinan dan tidak kembali pada keadaan semula lagi, sehingga tingkat efektifitas dari program-program tersebut dapat terjamin. Namun dalam kenyataannya, program-program tersebut dinilai oleh masyarakat masih belum cukup efektif dalam menekan tingkat kemiskinan, sehingga saran penulis disini ialah dalam mengimplementasikan setiap program penanganan masalah kemiskinan, sebaiknya selalu diberlakukan upaya pemberdayaan masyarakat, sehingga pada akhirnya nanti mereka dapat secara mandiri melepaskan diri dari jerat kemiskinan.